



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2021

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Materi RLPPD merupakan Ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan Inovasi Daerah.

A. Visi dan Misi Kabupaten Garut

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang merupakan pelaksanaan tahap kelima dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, sebagai tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah; ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional; fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.



Visi Pemerintah Kabupaten Garut dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 yaitu **“Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

b. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan,



sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

c. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

d. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

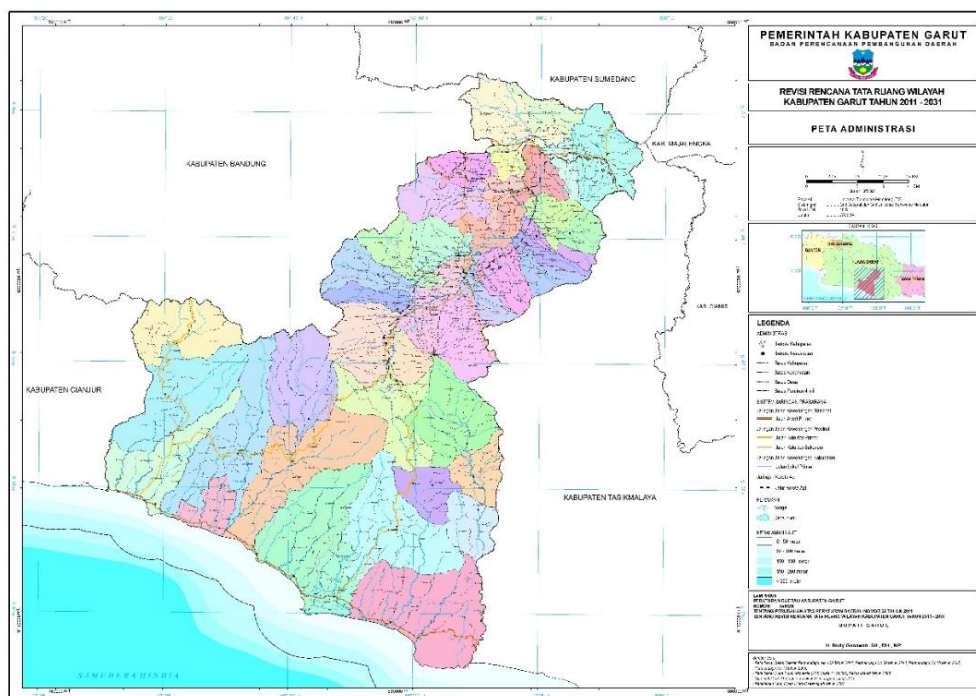
Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

B. Gambaran Umum

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut., dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Garut

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diproyeksikan sebanyak 2.604.787 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.334.360 jiwa dan perempuan sebanyak 1.270.427 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,56%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 mencapai rata-rata sebesar 849,8 jiwa/ km2, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 843,544 jiwa/ km2.

**Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 – 2021**

INDIKATOR	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.569.505	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.585.607	2.604.787
- Laki-Laki (Jiwa)	1.294.616	1.303.638	1.311.815	1.319.079	1.324.971	1.334.360
- Perempuan (Jiwa)	1.274.889	1.285.201	1.294.584	1.303.346	1.260.636	1.270.427
2. Sex Ratio (%)	101,55	101,43	101,33	104,68	105,1	105
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,82	0,75	0,68	0,61	0,75	0,56
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	836	842	848	844,02	843,54	849,80

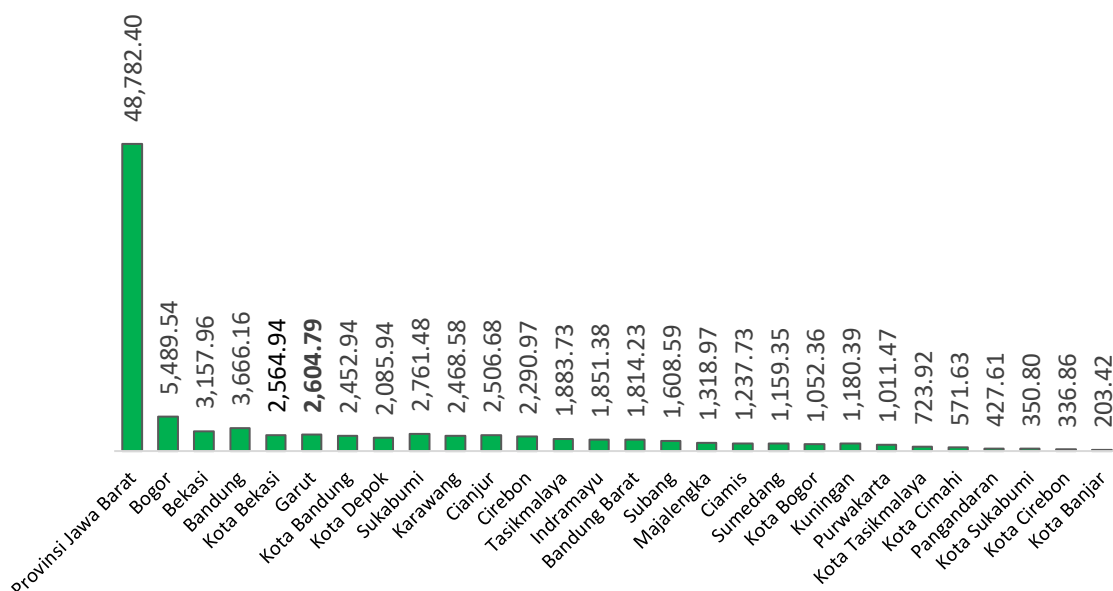
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2022

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun



2021 sebesar 105 yang berarti ada sekitar 105 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2021 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Garut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021,

Gambar 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.550.203 jiwa, meningkat 35.688 jiwa atau 1,42% dari tahun 2020 sebanyak 2.514.515 jiwa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK
Tahun 2020–2021

NO	INDIKATOR	2020	2021
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.514.515	2.550.203
	- Laki-Laki (Jiwa)	1.285.225	1.302.006
	- Perempuan (Jiwa)	1.229.290	1.248.197
2	Sex Ratio (%)	104,55	104,31
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	809,29	820,78
4	Jumlah Rumah Tangga (KK)	846.974	856.511

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.



Berdasarkan data pada penduduk terbanyak menurut Kecamatan tahun 2021 berada di Kecamatan Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota, Tarogong Kidul, dan Cilawu.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan
Berdasarkan Data SIAK Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Garut Kota	115.340	116.432	120.315	125.822	127.346
2	Karangpawitan	115.080	116.564	119.903	132.051	134.108
3	Wanaraja	41.409	41.832	41.655	46.333	47.313
4	Tarogong Kaler	83.701	84.664	86.458	91.821	92.720
5	Tarogong Kidul	101.346	102.453	104.582	111.330	112.076
6	Banyuresmi	78.440	79.376	82.182	89.798	91.588
7	Samarang	63.291	64.084	67.876	75.647	76.595
8	Pasirwangi	50.805	51.493	53.093	62.210	63.660
9	Leles	70.463	71.186	72.259	79.785	81.145
10	Kadungora	84.597	85.377	87.039	92.200	93.564
11	Leuwigoong	41.246	41.729	42.449	46.040	46.557
12	Cibatu	66.817	67.496	68.397	73.144	73.838
13	Kersamanah	34.989	35.450	35.610	38.289	38.676
14	Malangbong	106.335	107.687	111.994	128.568	130.890
15	Sukawening	49.830	50.417	51.488	55.859	56.429
16	Karangtengah	16.263	16.440	16.863	18.337	18.555
17	Bayongbong	88.269	89.129	89.994	97.931	98.363
18	Cigedug	35.695	36.017	36.856	41.451	42.031
19	Cilawu	96.650	97.551	99.052	105.627	107.319
20	Cisurupan	78.834	79.702	80.624	92.120	93.760
21	Sukaesmi	32.260	32.670	34.271	38.778	39.405
22	Cikajang	72.487	73.137	72.433	79.741	81.183
23	Banjarwangi	41.131	41.614	44.142	54.049	55.656
24	Singajaya	38.859	39.214	39.885	45.762	46.107
25	Cihurip	16.151	16.328	16.766	18.616	18.912
26	Peundeuy	19.518	19.753	20.342	23.222	23.702
27	Pameungpeuk	38.234	38.740	38.511	42.165	42.419
28	Cisompet	45.578	46.036	47.339	51.185	52.199
29	Cibalong	38.410	38.857	39.716	44.368	45.168
30	Cikelet	38.131	38.568	38.425	42.903	43.743
31	Bungbulang	46.800	47.281	50.186	54.917	55.221
32	Mekarmukti	15.226	15.429	16.126	18.176	18.474
33	Pakenjeng	53.506	54.125	56.200	64.975	66.068
34	Pamulihan	16.897	17.086	16.516	18.212	18.270
35	Cisewu	30.263	30.551	30.482	32.743	33.106



No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
36	Caringin	25.751	25.979	26.909	31.162	32.205
37	Talegong	25.876	26.101	25.681	28.102	28.511
38	Bl. Limbangan	65.614	66.286	67.553	75.841	76.794
39	Selaawi	38.249	38.574	39.021	41.474	41.613
40	Cibiuk	30.298	30.583	31.536	34.209	34.631
41	Pangatian	36.817	37.307	37.210	40.636	41.093
42	Sucinaraja	25.841	26.172	26.479	28.916	29.190
	Jumlah	2.211.297	2.235.470	2.284.418	2.514.515	2.550.203

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2021

C. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional

Tabel 4
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,12	66,45	0,50%
2	Angka Kemiskinan	9,98	10,65	6,71%
3	Angka Pengangguran	8,96	8,68	-3,13%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,26	3,58	384,13%
5	PDRB Per kapita	22,45	23,36	4,05%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,352	0,322	-8,52%

Sumber : BPS Kabupaten Garut

1) Indeks Pembangunan Masyarakat

Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2020-2021 mengalami kenaikan 0,33 poin atau tumbuh 0,50% dari tahun 2020 menjadi 66,45 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.



Tabel 5
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	IPM	Poin	66,12	66,45
A	Indeks Pendidikan	Poin	58,15	58,52
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,91	12,03
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	7,53
B	Indeks Kesehatan	Poin	79,09	79,37
	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,41	71,59
C	Indeks Daya Beli	Poin	62,84	63,17
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	7.876	7.961

Sumber : BPS Kabupaten Garut, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2021, dari sisi nilai IPM sebesar 66,45 poin berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan IPM (0,50%) berada pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, relatif sama dengan pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,50% dan Nasional sebesar 0,49%.

2) Angka Kemiskinan

Dari Data BPS pada *Berita Resmi Statistik No. 02/11/3205/2021*, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 18,58 ribu jiwa dari 262,78 ribu jiwa (9,98%) pada tahun 2020 menjadi sebanyak 281,36 ribu jiwa (10,65%) pada tahun 2021, atau meningkat sebesar 0,67%. Selama periode 2020-2021, dari sisi persentase penduduk miskin berada pada peringkat ke-10 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Tabel 6
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	301.202	310.437	320.050
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	235,19	262,78	281,36
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,98	9,98	10,65
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	1,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,29

Sumber : *Berita Resmi Statistik No. 02/11/3205/2021 BPS Kabupaten Garut, 26 November Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.*



Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2021 mengalami peningkatan Rp9.613,- per kapita per bulan atau sebesar 3,10% dari Rp310.437,- per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp320.050,- per kapita per bulan pada tahun 2021.

Menurut Kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2021. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2021 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan naik. Ini mengindikasikan adanya perburukan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 0,97 poin pada tahun 2020 menjadi 1,40 poin pada tahun 2021, artinya peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2021 tersebut di bawah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar 1,47 poin maupun Nasional sebesar 1,71 poin.

Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 0,15 poin pada tahun 2020 menjadi 0,29 poin pada tahun 2021, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin melebar. Kondisi Indeks Keparahannya Kemiskinan pada tahun 2021 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,38 poin maupun Nasional sebesar 0,42 poin.

3) Angka Pengangguran

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang



memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan
Kabupaten Garut Tahun 2017-2021

NO	URAIAN INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68
2	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212
3	Persentase Penduduk Bekerja	%	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,92	60,13	62,70	61,11	62,76
5	Jumlah Penduduk Usia Kerja)	Jiwa	1.801.059	1.822.722	1.842.301	1.892.059	1.912.716
6	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346
7	Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.052.573	1.096.134
8	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	667.811	726.741	687.230	735.879	712.370

Sumber : BPS Kabupaten. Garut, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.200.346 orang, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1.156.180 orang. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2021 meningkat dari 91,04% (1.052.573) pada tahun 2020 menjadi 91,32% (1.096.134) dimana angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 8,96% menjadi 8,68% pada tahun 2021. Adapun dari sisi jumlahnya naik dari 605 orang menjadi 104.212 orang.

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2021 sebesar 8,68% adalah sebesar 105,75% terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2020 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 6,49%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 9,82%.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro besaran PDRB pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp2,79 Triliun atau 4,81% dari Rp58,04 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp60,84 Triliun pada tahun 2021. Keadaan



ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 8
Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2019–2021

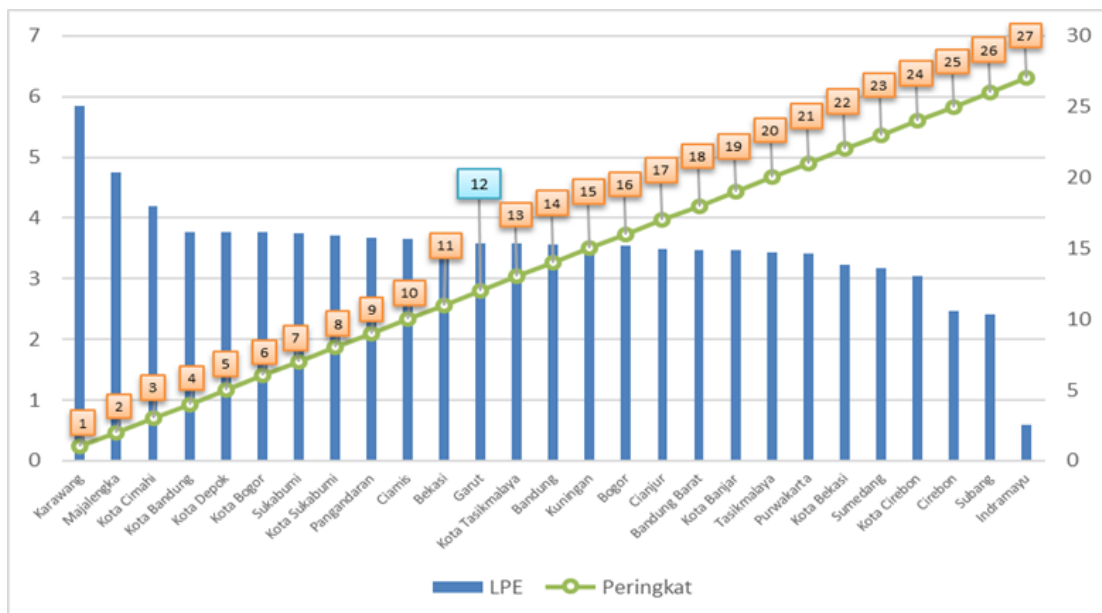
Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp	57.579.150	58.043.000	60.836.770
b. PDRB atas dasar harga Konstan 2010	Juta Rp	39.092.650	38.598.150	39.981.190
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.622.425	2.585.607	2.604.787
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp	22.116.000	22.450.000	23.356.000
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Rp	14.939.000	14.949.000	15.349.000
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	-1,26	3,58
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	8,69	1,65	3,90
h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh konstan	%	4,60	0,07	2,68
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	-0,17 - 2,9	3,39 - 4,37
Tingkat Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi	%	91,27	-131,72	92,27
Target PDRB Per Kapita adhb	Juta Rp	21,28	21,62-22,10	22,39-22,59
Tingkat Capaian Target PDRB Per Kapita adhb	%	103,16	100,70	103,85

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan Rp 1,38 Triliun atau tumbuh 3,58% dari sebesar Rp 38,60 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp39,98 Triliun pada tahun 2021. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021 meningkat sebesar 3,58%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -1,26%.

Selama periode 2020-2021, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 37,35% pada tahun 2021, meskipun memang mengalami penurunan 0,62% dari Tahun 2020 sebesar 37,97%. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2021 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,54% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,49%.

Pada periode 2021, kinerja perekonomian Kabupaten Garut sebesar 3,58% masih berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat (3,74%) dan Nasional (3,69%). Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-12, naik satu peringkat dibandingkan tahun 2020. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat setelah pada tahun 2020 sebanyak 24 kabupaten dan kota mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

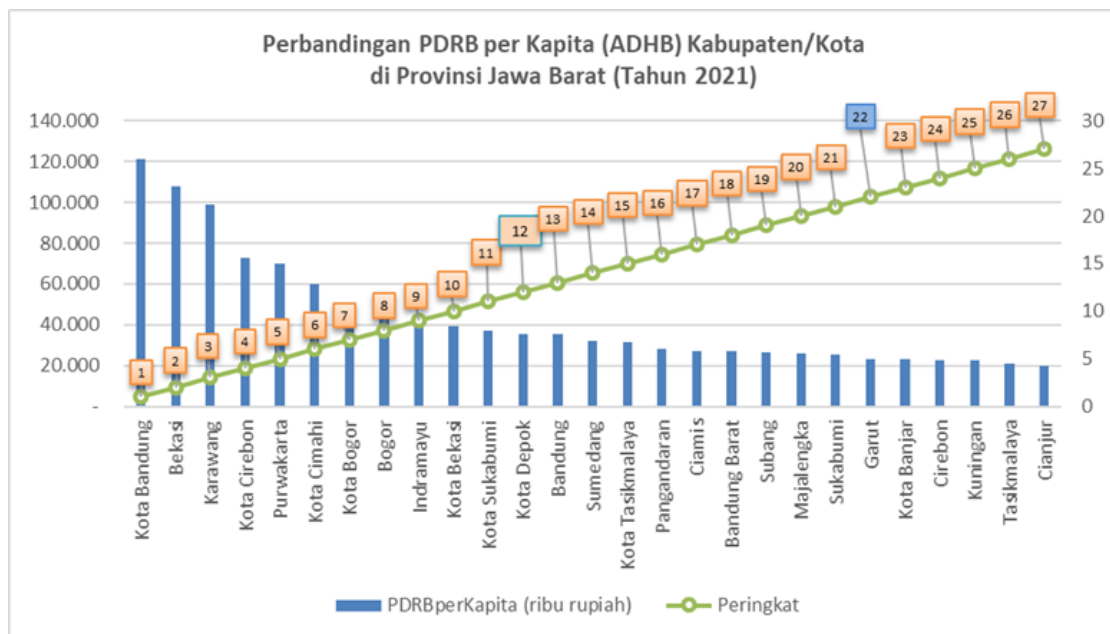
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

5) PDRB Per Kapita

Pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 4,05% atau dari semula Rp 22,45 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 23,36 juta pada tahun 2021. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata.

Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian kabupaten Garut masih tergolong rendah jika dibandingkan capaian Jawa Barat sebesar Rp 45,3 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 62,2 juta.

Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku kabupaten Garut tahun 2021 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, berada di peringkat 22 naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 4. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

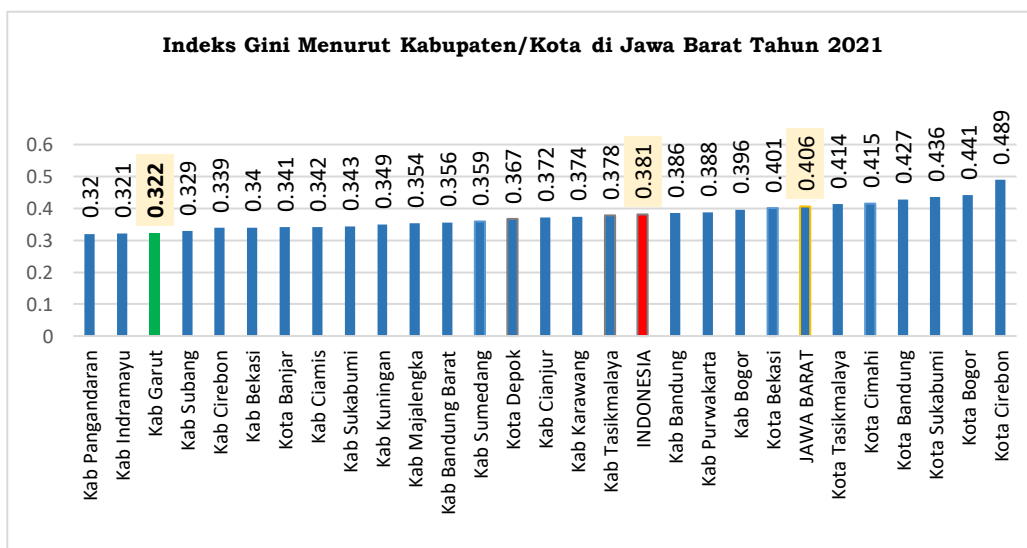
6) Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2021 berada pada level menengah dengan besaran 0,322, lebih baik dari tahun 2020 sebesar 0,352 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,406 dan Nasional sebesar 0,381.



Jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Barat, pada tahun 2021 kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding tahun 2020 pada peringkat ke-13 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 5. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

D. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial)

Tabel 9

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,40%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,45%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	79,66%



NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,06%
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,07%
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	71,43%
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,60%
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	66,32%
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46,67%
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42%
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	58,90%
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,71%
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,66%
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68,75%
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	82,74%



NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	52,58%
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81,89%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,87%
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	67,27%
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	82,34
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,64%
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%



NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Tidak ada rumah tangga yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1,36%
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,32%
		5	Jumlah Perumahan yang sudah atau sedang dibangun dilengkapi PSU	100%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	46,48%
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.596.172
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	512.038
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.954
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	72,26%
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,74 menit
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	91,57%



NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

E. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2021 terhadap penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020, bahwa nilai LPPD Kabupaten Garut Tahun 2020 belum bisa disajikan dikarenakan Kementerian Dalam Negeri belum mengumumkan secara resmi skor dan status kinerja LPPD Tahun 2020, adapun hasil EPPD Kabupaten Garut yang terakhir diumumkan oleh Kementerian dalam Negeri adalah hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018, dimana LPPD Kabupaten Garut tahun 2018 mendapat status kinerja "Sangat Tinggi".

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran Daerah

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Garut.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 (Anaudited)

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.709.453.806.651,00	4.684.404.923.196,61	99,47	4.496.835.424.032,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	492.892.942.188,00	560.783.376.918,61	113,77	474.636.531.982,00
4.1.01.	Pajak Daerah	122.382.000.000,00	126.588.915.160,00	103,44	116.413.508.912,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	17.559.136.763,00	15.259.959.070,00	86,91	11.970.216.330,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.455.066.612,00	6.455.066.625,00	100,00	7.059.036.226,00
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	346.496.738.813,00	412.479.436.063,61	119,04	339.193.770.514,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.875.759.194.255,00	3.784.572.413.274,00	97,65	3.698.448.232.086,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.258.963.088.650,00	3.261.973.058.051,00	100,09	3.101.009.916.392,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	616.796.105.605,00	522.599.355.223,00	84,73	597.438.315.694,00
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	340.801.670.208,00	339.049.133.004,00	99,49	323.750.659.964,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	31.128.045.500,00	20.133.542.423,00	64,68	323.750.659.964,00
4.3.03.	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	309.673.624.708,00	318.915.590.581,00	102,98	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Pada Tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Kabupaten Garut ditargetkan sebesar Rp4.709.453.806.651,00 dan terealisasi sebesar Rp4.684.404.923.196,61 atau 99,47 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 yang berjumlah Rp4.496.835.424.032,00, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,17%. Sumber pendapatan daerah diantaranya:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp492.892.942.188,00 dan terealisasi sebesar Rp560.783.376.918,61 atau 113,77%. Kontribusi realisasi PAD terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 11,97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp474.636.531.982,00, maka besaran realisasi anggaran PAD pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 18.15%.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp3.875.759.194.255,00 dan pada akhir Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp3.784.572.413.274,00 atau 97,65%. Kontribusi realisasi Dana Perimbangan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 80,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2020 sebesar Rp3.698.448.232.086,00 maka besaran realisasi anggaran Dana Perimbangan pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,33%.

c) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber Pendapatan Daerah yang terakhir adalah lain lain pendapatan daerah yang sah diantaranya pendapatan hibah, dana lain lainnya pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp340.801.670.208,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp339.049.133.004,00 atau sekitar 99,49%. Kontribusi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar 7,24%. Apabila dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 sebesar Rp323.750.659.964,00 maka besaran realisasi anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 mengalami kenaikan 4,73%.

2. Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021, Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 (Aunaudited)

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
5.	BELANJA DAERAH	4.938.938.117.892,00	4.649.602.155.581,00	94,14	4.573.907.976.515,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.536.807.019.350,84	3.289.003.496.580,00	92,99	3.141.558.508.100,00



KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.800.543.572.158,00	1.711.698.801.354,00	95,07	1.755.895.273.655,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.159.167.743.030,84	1.088.825.013.582,00	93,93	1.282.353.337.243,00
5.1.05.	Belanja Hibah	565.462.809.762,00	477.437.424.029,00	84,43	91.202.497.202,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.632.894.400,00	11.042.257.615,00	94,92	12.107.400.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	595.514.677.774,85	558.797.286.428,00	93,83	463.042.682.966,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	42.558.558.975,37	34.923.261.221,00	82,06	23.196.422.84200
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.053.211.923,00	114.413.219.545,00	92,23	112.554.255.289,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.446.155.963,48	204.878.310.049,00	95,09	62.135.130.589,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	193.306.162.002,00	184.540.470.291,00	95,47	172.448.460.943,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.065.978.911,00	20.042.025.322,00	99,88	71.452.189.931,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	84.610.000,00	0,00	0,00	21.256.223.372,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.859.055.774,32	39.452.922.903,00	94,25	167.929.166.487,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	41.859.055.774,32	39.452.922.903,00	94,25	167.929.166.487,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	764.757.364.992,00	762.348.449.670,00	99,69	801.377.618.962,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	14.036.325.356,00	13.045.583.078,00	92,94	15.517.586.117,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	750.721.039.636,00	749.302.866.592,00	99,81	785.860.032.845,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Belanja daerah pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.938.938.117.892,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.649.602.155.581,00 atau 94,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp4.573.907.976.515,00, maka realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,65%. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk membiayai:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.536.807.019.350,84 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.289.003.496.580,00 atau 92,99%. Komposisi realisasi Belanja operasi terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 70,74%. Apabila dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran Belanja operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.141.558.508.100,00, maka realisasi anggaran Belanja Operasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,69%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp595.514.677.774,85 dan direalisasikan sebesar Rp558.797.286.428,00 atau 93,83%. Komposisi realisasi Belanja Modal terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,02%. Apabila dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar



Rp463,042,682,966.00 maka realisasi anggaran Belanja Modal pada tahun 2021 mengalami kenaikan 20,68%

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp41.859.055.774,32 dan direalisasikan sebesar Rp39.452.922.903,00 atau 94,25%. Komposisi realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 0,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp167.929.166.487,00 maka besaran realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 mengalami Penurunan 76,51%.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp764.757.364.992,00 dan direalisasikan sebesar Rp762.348.449.670,00 atau 99,69%. Komposisi realisasi Belanja Transfer terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 mencapai sebesar 16,40%. Apabila dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp801.377.618.962,00 maka realisasi Belanja Transfer pada tahun 2021 mengalami penurunan 4,87%.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil daripada Anggaran Belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/ dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Tabel 12

**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 (Aaudited)**

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	229.484.311.241,00	229.484.311.241,00	100,00	317.706.863.724,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.634.311.241,00	240.634.311.241,00	100,00	331.619.863.724,00



KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.634.311.241,00	240.634.311.241,00	100,00	331.619.863.724,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.150.000.000,00	11.150.000.000,00	100,00	13.913.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000,00	11.150.000.000,00	100,00	13.913.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	229.484.311.241,00	229.484.311.241,00	100,00	317.706.863.724,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	264.287.078.856,61		240.634.311.241,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp229.484.311.241,00 dan sampai dengan akhir tahun 2021 anggaran tersebut dapat direalisasi sebesar Rp229.484.311.241,00 atau 100%, yang terbagi:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp240.634.311.241,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp240.634.311.241,00 atau 100,00%, yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), besaran realisasi penerimaan pembiayaan tersebut menurun dari anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp90.985.552.483,00 atau 27,44%.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp11.150.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.150.000.000,00 atau 100%, terdiri dari penyertaan modal. Besaran realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut menurun Rp2.763.000.000,00 atau 19,86% dari realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp13.913.000.000,00

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.684.404.923.196,61 atau 99,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.709.453.806.651,00, realisasi Belanja sebesar Rp4.649.602.155.581,00 atau 94,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.938.117.892,00 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp229.484.311.241,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp229.484.311.241,00. Dengan demikian, dari hasil realisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp264.287.078.856,61.



G. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terus berupaya mendorong tumbuhnya model inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar program inovasi Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021:

Tabel 13
Daftar Inovasi Daerah Tahun 2021

No	Nama Inovasi
1	Closed Loop Pertanian
2	Rumalin (Rumpon Ramah Lingkungan)
3	SERIKANDI (Sistem Restocking Ikan Mandiri) / Point Breeding Center (PBC)
4	Ikatan Dasi Umi (Implementasi peningkatan daya saing Usaha Mikro melalui kolaborasi Pentahelix)
5	Akselerasi program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui P2L berbasis kemitraan
6	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Ruang melalui RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Digital
7	Optimalisasi Galeri UMKM serta kolaborasi promosi digital dengan startup
8	Gentra Karya (Gerakan Tenaga Kerja Berkarya)
9	Sapakat Malire nu Miskin
10	Optimalisasi program penatausahaan dana Desa dalam penurunan angka stunting terintegitas berbasis kemitraan
11	Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui kolaborasi pengelolaan dan pengembangan spam di perdesaan
12	Optimalisasi Proses Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas Umum melalui Sistem Pengendalian Keproyekan PSU (SiDaKep)
13	Kampung Layak Anak (7 Lokasi)
14	Puskesmas Ramah Anak (3 Lokasi)
15	Penanganan sanitasi melalui pembentukan kewirausahaan sanitasi secara pentahelix
16	Program Indeks sistem merit dengan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi (IDP/HCDP)



No	Nama Inovasi
17	Sakinah Rapih (Stop Kematian Ibu dan Anak Relawan Pendampingan Ibu Hamil)
18	Gagah Ti Garut (Gerakan Cegah Stunting Garut)
19	Baby Café Mabagert (Makanan Bergizi bagi Penerus Garut)
20	Stop Kabur (Perkawinan di bawah umur)
21	SITAPAK (Sistem Informasi Data Terpadu Penyakit)
22	Gerakan Sinergi Terpadu Tangani Kasus perempuan (GESIT TANGKAP) melalui pembentukan Desa ramah perempuan dan peduli anak berbasis masyarakat
23	SIMARUKANTEH (Sistem Informasi Manajemen Rujukan Terintegritas) dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
24	PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)
25	Optimalisasi pengembangan program kampung iklim menuju “de PEPELING INDUNG” (Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Insya Allah Desa Unggul)
26	Kantor Pemerintahan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas
27	Dasi PAK RT optimalisasi pelaporan pajak daerah melalui dashboard realisasi pajak daerah
28	SIMBOL (Sistem Manajemen BPHTB Online) dalam rangka optimalisasi program peningkatan pendapatan asli daerah
29	SIBINWAS PAKDE (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)
30	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik melalui Pembentukan Publik Information Center (PIC)
31	SIKAWAT (Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan bangunan dan gedung)
32	Infolaras (Informasi Terpadu Selaras)
33	Pembentukan Tim khusus penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah tanggap cepat (Timsus GTAC)
34	SOP “Pas Kencan” Patroli Siaga Ketentaman dan Ketertiban Kecamatan



H. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) pada Tahun 2021 ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Upaya tersebut dilakukan dengan mengarahkan seoptimal mungkin berbagai sumber daya daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang dihadapi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam menghadapi permasalahan, keterbatasan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut tahun 2021 ini disampaikan, semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Garut, 30 Maret 2022



H. RUDY GUNAWAN, SH.,MH.,MP.